

P E N D A H U L U A N

Al- quran, wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad S.a.w. melalui Malaikat Jibril, dimaksudkan agar dijadikan sebagai petunjuk, pedoman hidup dan aturan hukum dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Firman Allah SWT. :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان (البقرة: ١٨٥)

("Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pemilah (antara yang hak dan yang bathil").

ذلك الكتاب لا يرب فيه هدى للمتقين (البقرة: ٢)

("Kitab (al- quran), yang tidak mengandung hal-hal yang meragukan, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa").

Didalam masyarakat, segala macam kontak sosial dapat terjadi baik yang bersifat khusus, mulai dari kontak antar individu maupun individu dengan kelompok, semuanya tidak terlepas dari persoalan yang timbul sebagai akibat adanya kontak sosial tersebut. oleh sebab itu dibuatlah peraturan-

an-peraturan sesuai dengan kebutuhan/masalah yang terjadi, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang dibuat antar individu untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak dirugikan atau merugikan pihak lain. Salah satu diantara bentuk kontak sosial tersebut adalah perjanjian.

Dalam kitab undang-undang hukum Perdata pasal 1233 disebutkan, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping undang-undang. (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986: 291).

Didalam Islam masalah perjanjian termasuk - dalam masalah Akhkamul 'Amaliyah (hukum - hukum amal) yang berkait erat dengan seluruh tindakan ataupun perbuatan mukallaf, baik ucapan, perbuatan, atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. (Abdul Wahab Khallaf, 1985: 40).

Dalam al- quran disebutkan secara global mengenai kaedah-kaedah umum saja, sedangkan mengenai tafsil (perincian-perincian) kaedah - kaedah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para mujta - hid dikalangan umat Islam untuk mengambil suatu kebijaksanaan.

Sebagian dari kaedah-kaedah umum tersebut,
termaktub dalam al- quran :

Pada dasarnya mu'amalah dalam Islam secara garis besarnya merupakan aturan-aturan yang melindungi masing-masing pihak agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan.

Sementara itu, dalam dunia kenyataan, pelaksanaan bagi hasil dalam dunia pertanian terdapat beraneka ragam sistem dan coraknya. Salah satu contoh dapat dilihat dalam sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang dilakukan oleh para petani di kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Menurut hasil pengamatan sementara, sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan diatas merupakan salah satu kerja sama pemilik sawah (petani) dengan buruh tani dalam usaha memproduksi pertanian, dimana mata pencaharian po-

b. Dulu pada umumnya pembagiannya, 1 : 5 ; yaitu satu bagian untuk buruh tani dan empat bagian untuk pemilik sawah. Tapi cara ini sekarang tidak lagi diperaktekkan.

Jika diperhatikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi diatas, mengesankan ketidakpastian keuntungannya. Bila hasil tanamannya baik, maka mereka (petani dan buruh tani) akan mendapat keuntungan, tetapi apabila sebaliknya mengalami kegagalan (bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena faktor diluar kemampuan mereka), maka yang dirugikan adalah pihak petani, sebab dia harus tetap memberikan bagian kepada buruh tani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Namun demikian, untuk mengetahui seberapa jauh sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Urgensi penelitian tentang masalah tersebut semakin terasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpai masalah penelitian tersebut. Dan diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan program pembinaan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.

B. Identifikasi masalah

Dari adanya latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi studi ini adalah: "Adanya sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi". Agar supaya masalah ini jelas, maka perlu dikaitkan dengan kondisi kehidupan beragama para petani yang bersangkutan. Menurut pengamatan sementara, mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang Islam. Dengan demikian perumusan masalahnya menjadi: "Sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh orang-orang Islam ditinjau dari hukum Islam".

C. Pembatasan masalah

Masalah bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan ditinjau dari hukum Islam masih bersifat umum, dan masih memerlukan pembatasan. Oleh karena itu studi yang direncanakan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- Segi tempat : Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen
Kabupaten Pasuruan.
- Segi waktu : Selama tahun 1994.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalahnya adalah : "Sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan se

lama tahun 1994 ditinjau dari hukum Islam".

D. Perumusan masalah

Berdasarkan hasil pembatasan masalah di atas, maka masalah studi ini dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh para petani di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama tahun 1994 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi tersebut ?

E. Tujuan studi

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan studi adalah :

1. Untuk mendiskripsikan tentang sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh para petani di desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama tahun 1994.
2. Untuk menetapkan apakah dalam sistem perjanjian bagi hasil tersebut terdapat penyimpangan dari hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan minimal dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan pedoman dalam menyusun hipotesis untuk penelitian berikutnya, juga untuk mengetahui dan menetapkan sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang di sahkan menurut hukum Islam.
2. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman oleh para petani, khususnya di desa Candi Wates dalam masalah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Pri-gen Kabupaten Dati II Pasuruan, tepatnya di desa Candi Wates.

- ## 2. Subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para petani dan para pengga-

- c. Aqad perjanjian, yang meliputi :
 1. Bentuk aqad
 2. Sarana yang dipakai dalam aqad
 3. Tempat aqad
 4. Waktu aqad
 5. Orang-orang yang terlibat dalam aqad.
 - d. Pelaksanaan pembagian hasil tanaman padi, yang meliputi :
 1. Waktu pembagian hasil tanaman padi
 2. Tempat pembagian hasil tanaman padi
 3. Teknik pembagian hasil tanaman padi
 4. Orang-orang yang terlibat dalam pembagian hasil tanaman padi
 5. Sarana yang dipakai dalam pembagian hasil tanaman padi.
5. Sumber data.

Sumber data penulisan ini adalah :

- a. Sepuluh orang petani
 - b. Sepuluh orang penggarap (buruh tani)
 - c. Tokoh formal : Kepala desa dan Sekretaris desa serta Pamong desa.
 - d. Tokoh Agama : Terdiri dari dua orang.
6. Tehnik penggalian data.

Untuk memperoleh seluruh data-data yang

kan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan kepada yang bersifat umum, yaitu sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi di desa Candi wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

b. Metode deduktif.

Diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.